

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA GALUNGAN KECAMATAN SAWAN KABUPATEN BULELENG

Oleh
Ni Kadek Risa Pratiwi¹ & Putu Agustana²

Abstraksi

Kemiskinan masih menjadi salah satu persoalan utama yang dihadapi pemerintah Indonesia. Untuk mengatasinya, telah dibuat berbagai kebijakan. Namun, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan dari proses perumusannya saja, melainkan juga dari bagaimana kebijakan tersebut dijalankan di lapangan. Tahap pelaksanaan menjadi bagian penting dalam menilai sejauh mana kebijakan tersebut memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Penelitian ini membahas pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) serta faktor-faktor yang memengaruhi implementasinya di Desa Galungan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik purposive sampling untuk menentukan informan. Data diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam, kemudian dianalisis melalui tahapan pengumpulan data, reduksi, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek komunikasi sudah berjalan dengan baik, komitmen para pihak yang terlibat juga mendukung kelancaran program, dan struktur birokrasi telah sesuai aturan. Namun, masih terdapat kendala pada sisi sumber daya manusia, meskipun anggaran dan perlengkapan penunjang lainnya telah tersedia. Faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan PKH di Desa Galungan antara lain adalah partisipasi masyarakat, dukungan dari Pemerintah Desa, serta kerja sama antar lembaga. Sedangkan hambatannya meliputi jumlah pendamping yang masih terbatas, akses jalan yang sulit saat kunjungan rumah, dan cuaca yang tidak menentu. Penulis menyarankan agar data dalam DTKS segera diperbarui agar bantuan tepat sasaran, serta menambah jumlah pendamping PKH guna memaksimalkan pelaksanaan program.

Kata kunci : Implementasi kebijakan, Program Keluarga Harapan (PKH)

*¹Alumni FIA UNIPAS email. kadekrisa014@gmail.com

*²Staf Pengajar FIA UNIPAS email. putu.agustana@unipas.ac.id

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masalah kemiskinan di Indonesia masih menjadi tantangan yang terus dihadapi oleh pemerintah dari tahun ke tahun. Secara etimologis, kata “miskin” berarti tidak memiliki harta benda dan berada dalam kondisi kekurangan. Menurut Suparlan (dalam Johan Arifin, 2020), kemiskinan merupakan situasi di mana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya secara layak.

Kemiskinan yang berlangsung terus-menerus dapat berdampak besar, terutama dalam bidang kesehatan dan pendidikan. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah telah melakukan berbagai langkah, salah satunya melalui peluncuran Program Keluarga Harapan (PKH) yang dimulai sejak tahun 2007. Program ini merupakan bagian dari sistem perlindungan sosial yang ditujukan bagi masyarakat miskin, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial sekaligus memutus mata rantai kemiskinan.

Peserta PKH dipilih berdasarkan data dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang dihimpun oleh pemerintah desa. Kriteria utama penerima adalah masyarakat miskin atau rentan miskin, umumnya dengan penghasilan tidak tetap. Desa Galungan, yang dikenal sebagai desa agraris, merupakan salah satu desa di mana sejumlah warganya aktif menerima bantuan melalui program PKH.

Melihat kenyataan bahwa banyak warga Desa Galungan menjadi penerima PKH, maka penting dilakukan analisis terhadap pelaksanaan program ini. Tujuannya adalah untuk menilai apakah implementasi di lapangan sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya, agar program PKH dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan Publik

Kebijakan dapat diartikan sebagai serangkaian prinsip atau gagasan yang dijadikan acuan dalam merencanakan dan melaksanakan suatu pekerjaan. Dalam

konteks manajemen, kebijakan juga berfungsi sebagai pedoman dalam mengambil keputusan guna mencapai tujuan tertentu. Dengan kata lain, kebijakan merupakan panduan bertindak bagi para pengambil keputusan.

Thomas R. Dye, yang dikutip dalam Eko Handoyo (2012:9), mendefinisikan kebijakan publik sebagai “apa pun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.” Artinya, kebijakan publik mencerminkan keputusan pemerintah dalam merespons suatu masalah—baik dengan bertindak maupun memilih untuk tidak bertindak.

Sementara itu, Anderson (dalam Islamy, 2009:17) menyebut kebijakan sebagai "serangkaian tindakan yang memiliki tujuan tertentu dan dijalankan oleh satu atau lebih aktor untuk menyelesaikan suatu persoalan." Definisi ini menekankan bahwa kebijakan adalah hasil tindakan yang terencana, dijalankan oleh individu atau kelompok untuk menangani isu-isu tertentu.

Perlu dipahami bahwa meskipun kebijakan merupakan bagian dari keputusan, tidak semua keputusan dapat dikategorikan sebagai kebijakan. Sebuah kebijakan selalu disusun dengan tujuan yang jelas. Menurut Gede Sandiasa (2015), keberhasilan suatu kebijakan dipengaruhi oleh dua hal utama: pertama, kualitas dari kebijakan itu sendiri; dan kedua, dukungan strategi yang menyertainya.

2.2 Implementasi Kebijakan Publik

Tahap implementasi merupakan bagian yang sangat penting dalam keseluruhan proses kebijakan. Hal ini karena pada tahap inilah dapat dilihat apakah kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah benar-benar dilaksanakan di lapangan, serta apakah kebijakan tersebut mampu menghasilkan output dan hasil akhir (outcomes) sesuai dengan yang direncanakan.

Menurut teori yang dikemukakan oleh George C. Edward III (dalam Subarsono, 2015), terdapat empat faktor utama yang memengaruhi berhasil atau tidaknya pelaksanaan suatu kebijakan. Keempat faktor tersebut adalah: 1) Komunikasi, yakni merujuk pada proses penyampaian informasi dari pembuat kebijakan kepada pelaksana dan penerima kebijakan. Kejelasan, konsistensi, dan

kelengkapan informasi menjadi kunci dalam mendukung keberhasilan implementasi. 2) Sumber Daya mencakup segala hal yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan, seperti tenaga kerja (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, serta perlengkapan pendukung lainnya. Tanpa sumber daya yang memadai, kebijakan sulit dijalankan secara optimal. 3) Disposisi atau Sikap Pelaksana yang menggambarkan kemauan, komitmen, dan keseriusan para pelaksana kebijakan untuk menjalankan program dengan sungguh-sungguh. Ketika pelaksana memiliki sikap positif terhadap kebijakan, maka peluang keberhasilannya akan lebih besar. Dan 4) Struktur Birokrasi, berkaitan dengan tatanan organisasi, pembagian tugas dan kewenangan, hubungan antarlembaga, serta ketersediaan prosedur operasional standar (SOP) yang mendukung kelancaran pelaksanaan kebijakan. Struktur birokrasi yang rapi dan jelas dapat memperkuat efektivitas implementasi.

2.3 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan yang bersifat global dan multidimensi, yang tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga memengaruhi berbagai bidang kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan kualitas tempat tinggal. Oleh karena itu, isu kemiskinan menjadi perhatian utama banyak negara, termasuk Indonesia, dalam upaya pembangunan berkelanjutan.

Secara umum, menurut Wikipedia, kemiskinan adalah kondisi ketika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, layanan pendidikan, dan fasilitas kesehatan. Definisi ini menegaskan bahwa kemiskinan tidak semata-mata berkaitan dengan kekurangan materi, tetapi juga mencakup keterbatasan akses terhadap pelayanan dan hak dasar sebagai manusia.

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia memberikan definisi yang lebih teknis, yakni kemiskinan merupakan ketidakmampuan individu dalam memenuhi standar minimum kebutuhan dasar, baik yang bersifat makanan maupun non-makanan. Untuk menentukan tingkat kemiskinan, BPS

menggunakan indikator garis kemiskinan, yaitu nilai pengeluaran minimum per kapita per bulan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Penduduk dikategorikan sebagai miskin apabila rata-rata pengeluarannya per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan tersebut.

Pengukuran ini penting karena menjadi dasar dalam perumusan kebijakan sosial dan ekonomi, termasuk dalam menentukan sasaran program bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), atau Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dengan memahami definisi dan indikator kemiskinan secara komprehensif, pemerintah dapat menyusun strategi penanggulangan kemiskinan yang lebih tepat sasaran, berkeadilan, dan berkelanjutan.

2.4 Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah salah satu upaya pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan, yang telah dilaksanakan sejak tahun 2007. Bantuan dalam program ini diberikan kepada keluarga miskin dan rentan miskin, dengan syarat utama bahwa mereka terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Melalui program ini, keluarga penerima manfaat (KPM) didorong untuk mengakses dan memanfaatkan layanan sosial dasar, seperti layanan kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, serta pendampingan. Selain itu, mereka juga diarahkan untuk terhubung dengan berbagai program perlindungan sosial lainnya secara berkelanjutan sebagai bagian dari program yang saling melengkapi (komplementer).

Walaupun PKH merupakan program jangka panjang, status sebagai peserta tidak bersifat tetap. Keluarga penerima bantuan hanya bisa mengikuti program ini maksimal selama enam tahun, selama mereka masih memenuhi kriteria yang ditentukan. Jika suatu saat keluarga tersebut tidak lagi memenuhi syarat, maka mereka akan dikeluarkan dari program secara alami melalui mekanisme yang disebut *Natural Exit*.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan para informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Informan tersebut terdiri dari Kepala Desa dan perangkatnya, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), serta masyarakat penerima dan non-penerima PKH. Selain wawancara, data juga diperoleh melalui observasi langsung di lapangan dan dokumentasi untuk memperkuat temuan yang didapat.

Data yang telah terkumpul akan melalui proses reduksi, yaitu penyaringan untuk memfokuskan pada informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, data yang telah direduksi akan disajikan dalam bentuk narasi, bagan, dan tabel, agar lebih mudah dipahami. Tahap akhir dari analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi untuk memastikan bahwa hasil penelitian benar-benar dapat dipercaya (kredibel).

Adapun fokus utama dari penelitian ini adalah: (1) pelaksanaan kebijakan PKH di Desa Galungan, yang dianalisis berdasarkan empat faktor utama yaitu komunikasi, disposisi, sumber daya, dan struktur birokrasi; dan (2) faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaan kebijakan PKH di desa tersebut.

Untuk memastikan keabsahan data dan meningkatkan tingkat kepercayaan hasil penelitian, dilakukan pengujian validitas melalui beberapa teknik, seperti triangulasi (perbandingan data dari berbagai sumber), transferabilitas (kemungkinan penerapan di konteks lain), dependabilitas (konsistensi data), dan konfirmabilitas (kepastian data dapat dipertanggungjawabkan).

4. HASIL PENELITIAN

4.1 Implementasi Kebijakan Keluarga Harapan di Desa Galungan Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng

Mengenai analisis implementasi PKH di Desa Galungan, peneliti menggunakan teori Edward III yang menyabarkan mengenai implementasi kebijakan melalui empat variabel sebagai faktor yang mempengaruhi

implementasi kebijakan, yaitu faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor disposisi dan faktor struktur birokrasi (Subarsono, 2015), yaitu :

4.1.1 Komunikasi

Proses komunikasi dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Galungan dilakukan melalui dua jalur utama. Pertama, komunikasi langsung antara pendamping PKH dan Pemerintah Desa, yang dilakukan melalui pertemuan tatap muka di Kantor Kepala Desa untuk membahas koordinasi teknis dan evaluasi pelaksanaan program. Kedua, komunikasi tidak langsung dengan masyarakat penerima manfaat dilakukan melalui media digital, khususnya grup WhatsApp. Dalam grup ini, pendamping menyampaikan berbagai informasi penting terkait jadwal pencairan bantuan, kewajiban peserta, serta pembinaan sosial. Bagi penerima manfaat yang tidak memiliki akses ke WhatsApp, informasi diteruskan melalui anggota keluarga atau tetangga yang tergabung dalam grup. Strategi komunikasi seperti ini sesuai dengan temuan Halimatussa'diah (2022) yang menyebutkan bahwa komunikasi interpersonal dan pemanfaatan teknologi berbasis komunitas merupakan pendekatan efektif dalam memperkuat implementasi program sosial secara partisipatif. Selain itu, studi di Medan oleh Sembiring (2024) juga menegaskan pentingnya komunikasi tatap muka untuk menjangkau kelompok rentan agar pesan program lebih mudah dipahami dan diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, perpaduan antara komunikasi langsung dan pemanfaatan media digital menjadi strategi penting dalam menjamin keterjangkauan informasi serta efektivitas pelaksanaan PKH di tingkat desa.

4.1.2 Sumber Daya

Sumber daya yang dibutuhkan dalam implementasi PKH terdiri dari sumber daya manusia (SDM), sumber daya keuangan, dan sumber daya peralatan. Pertama, mengenai SDM mengacu pada pendamping PKH yang bertugas mendampingi keluarga penerima PKH, yang dari hasil penelitian dikatakan masih kurang karena hanya terdapat satu pendamping PKH yang memegang tiga desa sekaligus. Kedua mengenai sumber daya keuangan, mengacu pada bantuan tunai yang didapatkan oleh penerima PKH. Bantuan tunai yang didapatkan oleh penerima PKH, diterima langsung oleh penerima melalui ATM masing-masing

tanpa adanya perantara dari pendamping. Pendamping hanya bertugas memberikan informasi mengenai jadwal cair bantuan tunai dan melakukan verifikasi bagi penerima PKH yang sudah menarik uangnya. Jumlah bantuan tunai yang didapatkan oleh penerima PKH berbeda-beda sesuai dengan kategori yang sudah ditetapkan. Ketiga, sumber daya peralatan yang dibutuhkan dalam implementasi PKH sudah tersedia seperti gedung serba guna/balai desa untuk melakukan pendampingan, namun dalam melakukan kegiatan home visit masih mengalami kendala di beberapa titik karena pembangunan akses menuju rumah warga belum merata mengingat letak rumah warga di Desa Galungan berada di perbukitan dan ditengah hutan.

4.1.3 Disposisi

Faktor disposisi mencerminkan sikap dan komitmen para pelaksana kebijakan, termasuk pendamping PKH, Pemerintah Desa, dan masyarakat penerima manfaat dalam menyukseskan pelaksanaan PKH. Dalam kasus simulasi di Desa Galungan, ketiga pihak ini telah menunjukkan komitmen tinggi: masyarakat rutin mengikuti aktivitas pendampingan, Pemerintah Desa secara konsisten mendampingi pelaksana pendampingan, dan pendamping PKH menerapkan prosedur sebagaimana mestinya. Temuan serupa juga dikemukakan oleh penelitian di Kecamatan Poasia, Kendari, yang menyatakan bahwa karakteristik implementator seperti komitmen, kejujuran, dan sikap demokratis sangat memengaruhi efektivitas pelaksanaan PKH (Latif, 2020). Selain itu, studi di Rokan Hulu juga menegaskan bahwa peran pendamping yang aktif dan bertanggung jawab sangat krusial dalam pengawasan serta kesuksesan program PKH di lapangan (Siregar, 2022). Dengan demikian, disposisi yang positif dari seluruh pihak menjadi landasan penting bagi keberhasilan implementasi PKH secara menyeluruh.

4.1.4 Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi memainkan peran krusial dalam efektivitas implementasi kebijakan PKH karena mencakup koordinasi antarlembaga dan kepatuhan terhadap prosedur operasional standar (SOP). Di Desa Galungan, koordinasi antara pendamping PKH, Pemerintah Desa, dan Dinas Sosial terbukti

berjalan lancar, sesuai dengan SOP yang telah diadopsi secara konsisten, baik oleh pendamping PKH saat ini maupun pendamping sebelumnya. Penelitian di Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, juga mencatat bahwa struktur organisasi pelaksana PKH telah dirancang secara sederhana dan tidak berbelit, sehingga meminimalisir hambatan koordinasi dan memudahkan pelaksanaan kebijakan di lapangan (Unsu, 2014). Selain itu, studi di Surabaya dan Konawe Utara memperkuat temuan bahwa penerapan SOP yang jelas serta mekanisme koordinasi antar lembaga secara terstruktur sangat memengaruhi kelancaran distribusi bantuan dan akses pelayanan PKH kepada masyarakat (Chasanah, dkk, 2021). Dengan demikian, struktur birokrasi yang tertata dengan baik dan koordinasi yang efektif antar lembaga menjadi fondasi penting bagi keberhasilan implementasi PKH di tingkat desa.

4.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Keluarga Harapan di Desa Galungan Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng

Keberhasilan implementasi kebijakan dapat kita lihat dari penerapan kebijakan dengan desain, tujuan dan sasaran kebijakan itu sendiri, serta bagaimana kebijakan tersebut dapat memberikan dampak atau hasil yang positif bagi pemecahan masalah yang dihadapi. Dalam setiap implementasi kebijakan pasti ada faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah faktor pendukung dan juga faktor penghambat.

4.2.1 Faktor Pendukung

Faktor pendukung pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Galungan antara lain adalah partisipasi aktif masyarakat, peran dukungan Pemerintah Desa, dan keterlibatan lembaga terkait seperti Dinas Sosial. Masyarakat penerima manfaat secara konsisten mengikuti pendampingan dan berbagai kegiatan PKH, menunjukkan kolaborasi tinggi dengan pendamping, suatu bentuk partisipasi yang menurut penelitian di Desa Sukawera tergolong tinggi dan terbukti memperkuat kesejahteraan keluarga melalui komunikasi serta kerjasama yang baik antara KPM, pendamping, dan pemerintah desa (Sutiman, 2021). Pemerintah Desa berperan sangat aktif dalam menyediakan fasilitas dan

mengoordinasikan pelaksanaan program, sebagai koordinator, evaluator, dan komunikator, sehingga keberlangsungan layanan PKH semakin optimal, sesuai dengan studi di Desa Sumberejo yang menyoroti posisi pemerintah desa sebagai penghubung utama antara pendamping, KPM, dan dinas sosial (Juti, dkk, 2020)

Selain itu, Dinas Sosial memberikan dukungan teknis dan pemantauan untuk memastikan program berjalan sesuai sasaran, refleksi dari peran penting pendamping sosial yang secara langsung melakukan asesmen dan pemetaan kebutuhan masyarakat penerima bantuan. Kombinasi dari ketiga faktor ini menciptakan kondisi implementasi PKH yang efektif dan sesuai dengan tujuan program sosial tersebut.

4.2.2 Faktor Penghambat

Faktor penghambat pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Galungan mencakup beberapa tantangan utama yang signifikan. Pertama, keterbatasan jumlah pendamping PKH di tingkat kecamatan, di mana satu pendamping sering bertanggung jawab atas hingga tiga desa, menyebabkan beban kerja yang sangat berat dan risiko tumpang tindih jadwal pendampingan—fenomena ini juga diidentifikasi dalam penelitian di Dompu dan Trenggalek sebagai kendala besar karena beban rasio antara pendamping dan jumlah KPM yang melebihi kapasitas ideal (Yunarni, dkk, 2019 dan Khoiriyah, 2025). Kedua, lokasi geografis yang sulit dijangkau, seperti rumah penerima PKH yang berada di perbukitan atau tengah hutan, memperlambat atau bahkan menghambat kegiatan kunjungan rumah (home visit). Hal ini selaras dengan pengalaman pendamping di Sumbawa yang harus bermalam atau berjalan kaki menempuh medan berat dan sungai karena akses jalan yang buruk (Kemensos, 2020). Ketiga, faktor cuaca dan medan tinggi turut mempersempit peluang pendamping menjangkau lokasi yang terpencil karena kondisi tidak menentu, yang menjadi masalah nyata di wilayah topografi serupa seperti Gorontalo (Kemensos, 2021). Kombinasi dari ketiga kendala ini berkontribusi signifikan terhadap efektivitas PKH, terutama dalam hal monitoring, validasi data, dan penyampaian layanan secara langsung kepada penerima manfaat..

5. PENUTUP

5.1 Simpulan

Implementasi kebijakan PKH di Desa Galungan secara umum sudah berjalan baik berdasarkan teori Edward III. Komunikasi antara pendamping, pemerintah desa, dan penerima manfaat berjalan lancar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semua pihak, termasuk pendamping PKH, pemerintah desa, dan masyarakat penerima, menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendukung program. Koordinasi antar lembaga juga berlangsung baik, meskipun jumlah pendamping masih terbatas. Sumber daya lainnya seperti dana dan peralatan dinilai cukup memadai. Dukungan aktif dari masyarakat, pemerintah desa, dan Dinas Sosial menjadi faktor pendukung utama. Namun, pelaksanaan masih terkendala oleh kurangnya jumlah pendamping, lokasi rumah penerima yang sulit dijangkau, serta kondisi cuaca yang tidak menentu.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian yang sudah dilaksanakan, adapun saran yang bisa penulis berikan adalah (1). Perlu adanya penambahan pendamping untuk mendukung pelaksanaan PKH untuk menunjang proses pelaksanaan kegiatan PKH, (2) Perlu dilakukan pendataan ulang di DTKS untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan sudah tepat sasaran, (3) Perlu adanya kegiatan pendampingan yang bersifat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya seperti pelatihan keterampilan, edukasi keuangan, dan edukasi mengenai kesehatan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Johan. 2020. "Budaya Kemiskinan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia". Dalam *Sosio Informa* Vol. 6 No. 02, Mei – Agustus, Tahun 2020. Kesejahteraan Sosial. Jakarta Timur.
- Halimatussa'diah. 2022. Strategi Komunikasi Pendamping PKH dalam Memberdayakan Keluarga Penerima Manfaat di Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang. *Jurnal Administrasi dan Inovasi Kebijakan*, Vol. 2(2). Yayasan Mitra Aksi Indonesia.

- Sembiring, Yusriani. 2024. Efektivitas Komunikasi Interpersonal Pendamping PKH dalam Meningkatkan Kepatuhan Penerima Manfaat di Kelurahan Tanjung Sari, Medan Selayang. *Jurnal Prointegrita*, Vol. 6(1). Universitas Darma Agung.
- Universitas Sumatera Utara. 2014. Struktur Birokrasi UPPKH di Kabupaten Aceh Tengah: Koordinasi dan Kepatuhan SOP dalam Pelaksanaan PKH Diakses dari: <https://text-id.123dok.com/document/oy86n5o0q-struktur-birokrasi-uppkh-di-kabupaten-aceh-tengah>
- Latif, M. R. 2020. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Poasia Kota Kendari Sulawesi Tenggara.
- Siregar, L. M. 2022. Peran Pendamping dalam Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (JOM Fekon)*, Vol. 9(1)
- Chasanah, Uswatun, Tharisma Novitasari, Aisyah Safira Nabila dan Calvin Edo Wahyudi, 2021. Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kecamatan Gayungan Surabaya Pada Era Adaptasi Kebiasaan Baru
- Juti, ML Setyawan, D Fithriana, N, 2020. Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pelayanan PKH di Desa Sumberejo, Kota Batu. Universitas Tribhuwana Tunggaladewi
- Sutiman, Ayuning, 2021. Partisipasi Masyarakat Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Mensejahterakan Keluarga Miskin di Desa Sukawera, Kabupaten Majalengka. IAIN Syekh Nurjati Cirebon
- Khoiriyah, Wanda Asmah, 2025. Kekurangan SDM Pendamping PKH: Tantangan Regulasi dan Rasio Kerja. Diakses dari: <https://trenggaleknjenggelek.jawapos.com/ekonomi/2595820725/kekurangan-sdm-pendamping-upaya-penambahan-terkendala-regulasi>
- Kementerian Sosial RI. (2020). Intip Jejak Pendamping PKH Terjang Medan Batulanteh, Sumbawa. Diakses dari: <https://kemensos.go.id/intip-jejak-pendamping-pkh-terjang-terjalnya-medan-batulanteh>
- Kementerian Sosial RI. (2021). Meski Dekat Kota, Akses Masih Sulit: Tantangan SDM PKH di Gorontalo. Diakses dari: <https://kemensos.go.id/meski-dekat-kota-tapi-aksesnya-masih-sulit-ini-tantangan-sdm-pkh-tanah-air-eps-03>
- BPS. (2019). Kemiskinan dan Ketimpangan. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2011/01/27/884/penjelasan-data-kemiskinan.html>. Diakses pada 08 Januari 2025.

- Handoyo, Eko. 2012. *Kebijakan Publik*. Cetakan Pertama. Widya Karya. Semarang
- Islamy, Irfan M. 2009. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Pedum Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2021. Kementrian Sosial RI. Jakarta.
- Sandiasa, Gede. 2015. “Strategi Implementasi Kebijakan Irigasi Berbasis Kearifan Lokal”. Dalam rosiding Seminar : *Local Genius* dalam Perspektif Kebijakan Publik, Hukum, Manajemen, Pertanian dan Pendidikan Oktober 2015 P.2-22. P3M UNIPAS Singaraja.
- Subarsono. 2015. *Analisa Kebijakan Publik* (Konsep,Teori dan Aplikasi). Pustaka Pelajar. Yogyakarta